

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Kejaksaan	20
1. Sejarah Jaksa dan Kejaksaan	20
2. Pengertian Kejaksaan, Jaksa dan Penuntut Umum	26
3. Perkembangan Tugas dan Wewenang Kejaksaan	27
B. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Luar Biasa	33
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	34
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah	

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	37
a. Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara	
Pidana Sebelum Kemerdekaan	40
b. Sejarah Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara	
Pidana Setelah Kemerdekaan	42
C. Tinjauan Tentang Prinsip-Prinsip Peninjauan Kembali	52
1. Permohonan Peninjauan Kembali semata-mata Hak	
Terpidana dan Ahli Warisnya	52
2. Pidana yang Dijatuhkan Tidak Boleh Melebihi Putusan Semula.	57
3. Permintaan Peninjauan Kembali Tidak Menangguhkan	
Pelaksanaan Putusan	58
4. Permintaan Peninjauan Kembali Hanya Dapat Dilakukan	
Satu Kali	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Sifat Penelitian	61
B. Bahan Penelitian	62
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	65
D. Analisis Data	66
E. Jalannya Penelitian	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Kewenangan Pengajuan Peninjauan	
Kembali Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam Undang-Undang	
Nomor 11 Tahun 2021	67
1. Tahap Perencanaan dan Tahap Penyusunan	74

a. Aspek Dokumen-Dokumen yang Menyertai Proses	
Perencanaan dan Penyusunan	74
b. Aspek Perkembangan Diskursus Kewenangan Peninjauan	
Kembali Oleh Jaksa	81
2. Tahap Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan	87
a. Aspek Dokumen-Dokumen yang Menyertai Proses	
Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan	87
b. Aspek Perkembangan Diskursus Kewenangan Peninjauan	
Kembali Oleh Jaksa	100
B. Kesesuaian Wewenang Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara	
Pidana Oleh Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	
Dengan Prinsip-Prinsip Peninjauan Kembali Dalam KUHP	110
1. Perspektif filosofis	111
2. Perspektif Sosiologis	119
3. Perspektif Yuridis	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	147
INDEKS ISTILAH	159
INDEKS SUBJEK	161
GLOSARIUM	162